
Analisis Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia Terhadap Kondisi Ekonomi Nasional

Umi Sholeha¹, Lilia Pasca Riani²
^{1,2}Universitas Negeri Yogyakarta*

e-mail: [1*umisholeha.2021@student.uny.ac.id](mailto:umisholeha.2021@student.uny.ac.id), [2*lilia.pasca.riani@uny.ac.id](mailto:lilia.pasca.riani@uny.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak larangan ekspor biji nikel yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap perdagangan internasional dan ekonomi nasional. Kebijakan ini diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan memperkuat industri hilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis deskriptif. Hasil yang dari penelitian ini bahwa kebijakan larangan ekspor biji nikel memiliki dampak yang kompleks dan beragam. Di satu sisi, kebijakan ini berhasil meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri melalui pengembangan industri pengolahan nikel dan mendorong investasi di sektor hilir. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan signifikan. Dalam jangka pendek, terdapat penurunan pendapatan ekspor yang mempengaruhi devisa negara.

Kata kunci : biji nikel, larangan ekspor, perdagangan internasional, WTO

Pendahuluan

Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, menjadikannya aset berharga untuk dipasarkan di pasar global. Berbagai komoditas, seperti hasil pertanian, pertambangan, kehutanan, dan industri kayu salah satu contohnya adalah nikel, hasil pertambangan Indonesia yang memiliki nilai ekspor tinggi dan berperan penting dalam meningkatkan devisa negara. Kekayaan alam ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaatnya bagi kemakmuran bangsa.

Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, aktif berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Hal ini dilakukan untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa di kancah global. Menurut Diphayana, perdagangan internasional adalah perdagangan antar negara dari suatu

barang dan jasa atau uang yang menghasilkan keuntungan dan manfaat yang didasarkan pada kehendak sukarela dari masing masing negara (Diphayana, 2018). Perdagangan internasional ibarat jembatan yang menghubungkan kekayaan alam Indonesia dengan pasar global. Keberagaman sumber daya alam, sumber daya manusia, letak geografis, dan iklim yang dimiliki setiap negara menjadi daya tarik untuk melakukan perdagangan. Indonesia, dikaruniai alam yang berlimpah, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan kekayaan ini melalui perdagangan internasional. Keuntungan dari perdagangan internasional bagi Indonesia tidak hanya sebatas keuntungan ekonomi tetapi ada transfer teknologi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah beberapa manfaat lain yang dapat diraih.

Sejak 1 Januari 1995, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akses perdagangan internasional dengan ikut serta sebagai anggota World Trade Organization (WTO). Keanggotaan ini merupakan tindakan strategis yang meningkatkan perdagangan internasional dan meningkatkan daya saing barang-barang Indonesia di pasar global (Jamilus, 2017). Namun dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota akan membawa konsekuensi dimana Indonesia harus mematuhi aturan dan perjanjian yang telah disepakati oleh seluruh anggota organisasi. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek, seperti tarif bea masuk, subsidi, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa perdagangan (Kurniawardhani, 2021).

Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, salah satunya biji nikel. Kandungan nikel di Indonesia terbesar di dunia, menjadikannya aset berharga untuk memajukan ekonomi bangsa. Dengan cadangan bijih nikel yang besar dan berkualitas tinggi, Indonesia adalah salah satu produsen bijih nikel terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan strategis dalam beberapa tahun terakhir untuk memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi negara. Sehingga pemerintah membuat kebijakan yaitu melarang ekspor bijih nikel mentah (Tsirwiyati, 2023). Kebijakan ini dapat meningkatkan nilai tambah nikel Indonesia. Indonesia dapat mengolah bijih nikel menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti feronikel, baterai, dan komponen elektronik dengan mengembangkan industri hilirisasi. Hal ini memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, dan memajukan sektor manufaktur Indonesia.

Namun, konsekuensi nasional dan internasional dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini sangat kompleks. Karena Indonesia merupakan pemasok utama nikel, keputusan ini berdampak pada pasar nikel global dari sudut pandang perdagangan internasional. Keputusan Indonesia untuk melarang ekspor bijih nikel sejak tahun 2020 telah mengubah lanskap perdagangan nikel global. Sebagai pemasok utama nikel di dunia, kebijakan ini berdampak signifikan terhadap pasokan, harga, dan industri nikel di berbagai negara. Keputusan Indonesia untuk melarang ekspor bijih nikel sejak tahun 2020 telah mengundang reaksi dari Uni Eropa (Ramadhana *et al.*, 2024). Negara-negara di wilayah ini, yang sangat bergantung pada nikel Indonesia, merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Sehingga Uni Eropa melemparkan gugatan ke WTO dengan tuduhan bahwa kebijakan larangan ekspor ini melanggar prinsip perdagangan bebas. Uni Eropa mengklaim bahwa kebijakan ini menghalangi akses industri mereka ke bahan baku vital.

Tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh Indonesia pada tahun 2020 adalah untuk mendorong industri nikel di dalam negeri untuk hilirisasi dengan mengubah bijih nikel

menjadi produk berharga seperti komponen elektronik dan baterai (Mastuti and Syarwi, 2021). Uni Eropa tidak senang dengan kebijakan ini karena industri mereka bergantung pada impor bijih nikel mentah dari Indonesia. Uni Eropa juga menganggap kebijakan ini melanggar aturan World Trade Organization (WTO) dan menghalangi perdagangan.

Negara-negara yang memiliki industri yang sangat bergantung pada impor nikel untuk kebutuhan produksi mereka, di antara lain Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Tiongkok, negara tersebut tidak setuju dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan oleh Indonesia. Negara-negara tersebut menegaskan bahwa kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah yang dilakukan Indonesia akan meningkatkan biaya produksinya, merusak pasar dunia, dan menyebabkan kelangkaan komoditas (Radhica and Wibisana, 2023).

Larangan ekspor bijih nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020 adalah hasil dari upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan industri domestik. Sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia berusaha mendorong pengolahan nikel di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungannya pada ekspor bahan mentah. Sehingga hal ini menimbulkan dampak yaitu meningkatnya tekanan diplomatik dan risiko sanksi perdagangan, yang dapat mengganggu hubungan ekonomi dengan negara-negara pengimpor utama, adalah konsekuensi dari hal ini bagi Indonesia. Selain itu, perselisihan ini memengaruhi cara investor dari seluruh dunia melihat kebijakan perdagangan Indonesia ini dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan iklim investasi dalam jangka panjang (Sari and Sugito, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan untuk menjaga stabilitas nasional dan mengurangi efek larangan ekspor bijih nikel. Salah satu kebijakan tersebut adalah pengetatan jumlah ekspor komoditas bijih nikel (Syafira *et al.*, 2023). Kebijakan ini dibuat karena pemerintah ingin menjaga stok bijih nikel dalam negeri. Terdapat prediksi bahwa stok nikel mentah dalam negeri akan semakin menipis. Kekhawatiran ini semakin meningkat karena nikel mentah adalah salah satu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui yang tidak dapat diproduksi kembali jika stoknya habis. Akibatnya, perlu dilindungi ketersediaan komoditi terkait.

Tujuan observasi ini adalah untuk menganalisis efek yang ditimbulkan oleh larangan ekspor biji nikel oleh pemerintah Indonesia terhadap ekonomi nasional dan perdagangan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada dinamika perdagangan global, khususnya di bidang pertambangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini BPS, jurnal-jurnal terkait, peraturan dan kebijakan terkait larangan ekspor biji nikel, laporan penelitian dan analisis dari lembaga WTO atau kementerian perdagangan dan berbagai pemberitaan media massa terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dimana data dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lainnya yang relevan. Cara melakukan analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis deskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

Pada tahun 2020, Indonesia mengambil kebijakan yang lebih agresif dengan menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Kebijakan ini menjadi sorotan dunia, menuai kritik dan pujian. Di satu sisi, kebijakan ini dibenarkan oleh potensinya untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan pendapatan nasional. Sebagai salah satu bahan baku terpenting dalam industri baterai, nikel digunakan secara luas di Indonesia, dan sebagai hasilnya, negara ini memimpin dalam pengembangan fasilitas manufaktur nikel. Hal ini membuka peluang bagi para pekerja baru untuk mulai bekerja dan meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu menjaga sumber daya alam. Penambangan bijih nikel sering dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup termasuk penggundulan hutan dan polusi udara. Melalui konservasi nikel nasional, Indonesia dapat mencapai standar lingkungan yang lebih berkelanjutan dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.

Namun, dalam di sisi lain, kebijakan ini juga menuai kritik, terutama dari negara-negara anggota Uni Eropa. Mereka menyatakan bahwa kebijakan ekspor ini merupakan hambatan perdagangan dan pelanggaran peraturan WTO. Uni Eropa bahkan membawa Indonesia ke WTO untuk menyelesaikan sengketa ini. Pada tahun 2021, Uni Eropa membawa kebijakan Indonesia ke ranah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan sejak tahun 2020. Uni Eropa berargumen bahwa kebijakan ini melanggar aturan perdagangan internasional, khususnya GATT Pasal XI: 1, yang melarang pembatasan ekspor produk mentah (Hadad, Novianty and Adolf, 2022).

Setelah melalui prosedur yang panjang, WTO akhirnya memutuskan bahwa hukum Indonesia bertentangan dengan peraturan WTO. Indonesia tidak memiliki alasan yang cukup untuk menjustifikasi larangan ekspor bijih nikel, seperti yang dinyatakan oleh WTO, yaitu tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendukung argumen ini. Panel menilai bahwa Indonesia belum menunjukkan bahwa larangan ekspor adalah cara yang paling tepat dan tidak diskriminatif untuk mencapai tujuan tersebut. WTO menilai bahwa larangan ekspor menyebabkan kenaikan harga nikel global, yang berdampak buruk pada industri pengguna nikel di negara-negara lain. Sehingga dengan hal itu, Indonesia dinyatakan kalah dalam sengketa ini dan diwajibkan untuk mencabut larangan ekspor bijih nikel dalam waktu tertentu.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengajukan banding terhadap keputusan ini. Indonesia mengajukan banding karena panel WTO dinilai tidak mempertimbangkan tujuan kebijakan larangan ekspor biji nikel secara menyeluruh. Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa kebijakan ini adalah upaya untuk mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional, bukan hanya tindakan proteksionis. Banyak keuntungan yang diharapkan dari hilirisasi untuk Indonesia, termasuk peningkatan pendapatan negara, penambahan lapangan kerja, dan pengembangan industri berteknologi tinggi.

Indonesia menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan hak setiap negara untuk mengelola sumber daya alamnya untuk keuntungan nasional dan kemakmuran ekonomi. Untuk menghindari ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang lebih ramah lingkungan dan kompetitif, proses

hilirisasi dianggap sebagai langkah penting. Disisi lain, Indonesia memiliki batas waktu hingga akhir tahun 2024 untuk menyelesaikan banding. Selama periode ini, pemerintah akan berusaha mendukung kebijakan larangan ekspor dengan menyajikan argumen yang lebih kuat dan data yang lebih mendalam. Untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, proses ini juga akan melibatkan diplomasi ekonomi dan negosiasi aktif dengan mitra dagang dan organisasi internasional. Jika banding ini berhasil, Indonesia akan memiliki lebih banyak legitimasi untuk melanjutkan kebijakannya untuk melarang ekspor biji nikel, mendorong industri pengolahan dalam negeri. Namun, jika banding ditolak, Indonesia harus mempertimbangkan cara lain untuk mencapai tujuan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah tanpa melanggar aturan perdagangan internasional.

Dampak kebijakan proteksionisme Biji Nikel

Dampak Positif

- 1. Peningkatan nilai tambah :** Dengan membatasi ekspor bijih mentah, perusahaan tambang didorong untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi seperti feronikel, nikel matte, dan stainless steel. Peluang diversifikasi produk turunan nikel terutama seperti baterai untuk kendaraan listrik, dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia di pasar global. Dengan berfokus pada produk bernilai tambah tinggi, Indonesia mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Ini membantu menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan berdaya saing (Gunadi, 2024; Kompas, 2024b).
- 2. Menciptakan peluang lapangan kerja baru :** Pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan nikel akan menciptakan banyak lapangan kerja baru, baik di sektor konstruksi, operasional, maupun pemeliharaan. Lebih lanjut pertumbuhan industri pengolahan akan mendorong perkembangan sektor pendukung seperti logistik, permesinan, dan jasa terkait. Pembukaan industri pengelolaan bijih nikel akan menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi puluhan ribu bahkan jutaan tenaga kerja yang dapat direkrut .
Pengembangan industri pengolahan nikel mendorong peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hilirisasi industri nikel berdampak pada kesejahteraan rakyat meningkat. Adanya alih teknologi dan tumbuhnya usaha kecil menengah di sekitarnya, berdampak pada kesejahteraan rakyat meningkat (Hikmah, 2023; Lenora, 2024).
- 3. Meningkatkan pendapatan negara :** Larangan ekspor bijih nikel meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat hingga 263% sejak pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel. Dengan meningkatnya nilai ekspor produk olahan nikel, pendapatan negara dari pajak ekspor dan royalti juga mengalami peningkatan. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kenaikan nilai ekspor turut memperkuat cadangan devisa negara, yang dapat digunakan untuk stabilisasi ekonomi dan memenuhi kebutuhan impor penting lainnya (Gunadi, 2024; Kompasiana, 2024).

- 4. Memperkuat industri domestik :** Dengan ketersediaan bahan baku nikel yang lebih besar di dalam negeri, Indonesia dapat mengembangkan industri baterai domestik, mengurangi ketergantungan pada impor baterai dan komponen baterai. Peningkatan kapasitas pengolahan dalam negeri menguatkan industri domestik, membuat Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi dalam negeri.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri baterai domestik karena bahan baku nikel yang tersedia di dalam negeri. Nikel, yang digunakan secara luas dalam berbagai perangkat elektronik dan kendaraan listrik, adalah bagian penting dari baterai lithium-ion, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada baterai dan komponennya yang diimpor dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (Menpanrb, 2023; Lenora, 2024).

Pengembangan industri baterai domestik akan membuka peluang investasi baru dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pabrik baterai di Indonesia akan membutuhkan tenaga kerja berkualitas tinggi, yang akan memperkuat basis industri nasional dan mendorong inovasi dan penelitian di bidang teknologi baterai.

Selain itu, peningkatan kapasitas manufaktur nikel di negara ini akan meningkatkan industri domestik secara keseluruhan. Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produknya sebelum diekspor dengan mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi di dalam negeri. Selain meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor barang bernilai tinggi, hal ini juga akan mengurangi defisit perdagangan dengan mengurangi kebutuhan impor barang jadi (Putra, 2022; Winona *et al.*, 2022; Menpanrb, 2023; Kompas, 2024b).

Mengembangkan industri baterai domestik akan memungkinkan Indonesia untuk menjadi lebih mandiri dalam memenuhi permintaan bisnis dan konsumennya sendiri. Kemandirian ini sangat penting untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan menghadapi perubahan harga dan pasokan di pasar global. Selain itu, Indonesia dapat menghemat devisa dan mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan sektor-sektor penting lainnya dengan mengurangi ketergantungannya pada impor.

- 5. Perkembangan infrastruktur yang masif :** Pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan akan mendorong pengembangan infrastruktur terkait sebagai prasarana pendukung seperti pelabuhan, jalan, dan fasilitas energi.

Peningkatan kapasitas pelabuhan yang sudah ada atau pembangunan pelabuhan baru merupakan keuntungan besar. Dengan memungkinkan ekspor dan impor bahan baku dan produk akhir, pelabuhan-pelabuhan ini akan meningkatkan efektivitas logistik dan mengurangi biaya transportasi. Untuk mendukung mobilitas alat berat, bahan baku, dan tenaga kerja saat membangun smelter, pengembangan jalan raya dan jembatan sangat penting. Pada akhirnya, peningkatan aksesibilitas akan menguntungkan masyarakat umum (SetKabRI, 2022; MenkoPMK, 2024).

Smelter membutuhkan pasokan listrik yang besar dan stabil, sehingga pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi sangat penting untuk pengembangan smelter. Infrastruktur energi ini tidak hanya akan mendukung operasional smelter, tetapi juga dapat memperkuat jaringan energi nasional dan

memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dengan meningkatkan pasokan listrik. Pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan akan mendorong pengembangan infrastruktur yang lebih luas, mencakup pelabuhan, jalan, dan fasilitas energi, yang semuanya berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (SetKabRI, 2022; KemenkoPerekonomianRI, 2023; MenkoPMK, 2024).

Dampak Negatif

1. Dalam jangka pendek dapat mengurangi pendapatan ekspor

Larangan atau pembatasan ekspor bijih nikel dapat menyebabkan penurunan pendapatan dari ekspor dalam jangka pendek sebelum kapasitas pengolahan domestik berkembang sepenuhnya. Kebijakan proteksionisme dapat memicu sengketa dagang dengan mitra dagang utama seperti Uni Eropa, yang dapat berdampak pada hubungan perdagangan dan ekonomi.

Tujuan pemerintah Indonesia untuk melarang atau membatasi ekspor bijih nikel adalah untuk mendorong pengolahan nikel di dalam negeri. Meskipun langkah ini memiliki banyak manfaat jangka panjang, seperti meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan kemandirian industri, ada beberapa konsekuensi jangka pendek yang harus diperhatikan.

Pertama dan terpenting, larangan atau pembatasan ekspor bijih nikel berpotensi mengurangi keuntungan ekspor dalam jangka pendek. Negara-negara yang sebelumnya bergantung pada pendapatan dari ekspor bijih mentah mungkin menghadapi masalah ekonomi, terutama jika kapasitas pengolahan domestik belum sepenuhnya berkembang untuk menyerap produksi nikel yang ada. Penurunan pendapatan ini dapat berdampak pada anggaran negara dan program pembangunan yang bergantung pada pendapatan dari sektor pertambangan (Firdaus, 2022; Permatasari, 2022).

Selain itu, kebijakan proteksionisme ini dapat menyebabkan konflik dagang dengan mitra dagang penting seperti UE. Mitra dagang yang terpengaruh oleh pembatasan ekspor mungkin melihat kebijakan ini sebagai diskriminasi dan melanggar aturan perdagangan internasional. Ini dapat menyebabkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menggugat dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Uni Eropa adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, sengketa dagang dengan Uni Eropa dapat memengaruhi banyak sektor ekonomi. Ada kemungkinan Uni Eropa akan menerapkan tarif atau sanksi terhadap barang-barang Indonesia lainnya, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada banyak industri di Indonesia (Putra, 2022).

Untuk mengurangi efek buruk jangka pendek, pemerintah harus mengambil tindakan yang lebih bijaksana, seperti memberikan insentif kepada investor untuk membangun pabrik nikel dan baterai di Indonesia, dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Kebijakan proteksionisme ini dapat menjadi langkah penting menuju pembangunan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan jika dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan terencana.

2. Biaya investasi yang tinggi dan beresiko

Investasi untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel memerlukan biaya yang besar dan waktu yang panjang. Ini bisa menjadi tantangan bagi perusahaan tambang dan pemerintah. Perlu adanya transfer teknologi dari negara maju untuk membangun industri pengolahan yang efisien dan berdaya saing, yang juga memerlukan investasi signifikan. Disisi lain juga muncul risiko bahwa proyek-proyek smelter dan pengolahan mungkin tidak berjalan sesuai rencana karena berbagai faktor seperti ketidakpastian pasar, perubahan kebijakan, atau tantangan teknis (Hutabarat, 2024; Spaying, 2024).

Transfer teknologi dari negara-negara maju adalah komponen penting yang dapat membantu mengatasi masalah ini. Untuk memastikan industri nikel dapat beroperasi dengan efisien dan berdaya saing di pasar global, transfer teknologi pengolahan dan pemurnian nikel memerlukan investasi besar dalam pelatihan tenaga kerja, pembelian peralatan canggih, dan pengembangan infrastruktur pendukung. Namun, Indonesia dapat membangun industri pengolahan nikel yang modern dan kompetitif diseluruh dunia dengan adanya transfer teknologi.

Namun, tidak boleh diabaikan bahwa proyek smelter dan pengolahan nikel dapat menghadirkan bahaya. Misalnya, ketidakpastian pasar dapat mempengaruhi harga nikel di seluruh dunia dan prospek ekonomi proyek-proyek tersebut. Perubahan kebijakan nasional dan internasional juga dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Tantangan teknis juga menjadi faktor yang signifikan. Pengembangan fasilitas pengolahan nikel memerlukan teknologi yang kompleks dan spesifik, yang jika tidak diterapkan dengan benar, dapat mengakibatkan masalah operasional dan penurunan efisiensi. Selain itu, tantangan dalam hal ketersediaan dan kualitas bahan baku, serta masalah logistik dan infrastruktur, dapat menghambat kelancaran proyek (KoranTEMPO, 2024; Sukri, 2024).

- 3. Dampak buruk pada lingkungan:** Pengolahan bijih nikel dapat menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Indonesia perlu memastikan bahwa standar lingkungan yang ketat diterapkan dan diawasi.

Pengolahan nikel memerlukan penggunaan bahan kimia dan pemanasan, yang dapat menyebabkan limbah berbahaya, emisi gas rumah kaca, dan pencemaran air dan tanah. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk menerapkan dan mengawasi standar lingkungan yang ketat.

Menerapkan regulasi yang kuat dan komprehensif adalah langkah pertama dalam menjamin pengelolaan lingkungan yang baik. Pemerintah harus menetapkan standar lingkungan yang jelas untuk setiap fase pengolahan bijih nikel, mulai dari penambangan hingga pembuangan limbah. Regulasi ini harus mencakup pembatasan emisi gas berbahaya, pengelolaan limbah cair dan padat, dan perlindungan lingkungan sekitar. Pengawasan yang ketat juga penting untuk memastikan bahwa perusahaan tambang dan pengolahan mematuhi peraturan lingkungan. Pemerintah harus membangun sistem pemantauan yang efektif, yang mencakup inspeksi rutin, pemantauan kualitas udara dan air, dan audit lingkungan berkala. Penggunaan teknologi modern, seperti sensor satelit dan lingkungan,

dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pengawasan (Kasyfilham, 2024; Sukri, 2024).

Indonesia harus menerapkan undang-undang dan pengawasan tambahan untuk mendorong bisnis untuk mengadopsi praktik pengolahan yang ramah lingkungan. Ini termasuk penerapan teknologi bersih yang dapat mengurangi emisi dan limbah serta penerapan sistem daur ulang dan pengelolaan limbah yang efektif. Perusahaan juga harus didorong untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan.

Edukasi dan kesadaran lingkungan juga sangat penting. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik. Program pendidikan dan pelatihan bagi pekerja tambang dan masyarakat sekitar tambang dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (KoranTEMPO, 2024).

4. Respon pasar global yang berefek domino pada perekonomian domestik:

Kebijakan proteksionisme dapat mempengaruhi harga nikel di pasar global. Jika Indonesia adalah pemasok utama bijih nikel, pembatasan ekspor dapat menyebabkan kenaikan harga global, yang bisa berdampak pada industri hilir di negara lain.

Kebijakan proteksionisme, seperti pembatasan ekspor bijih nikel, dapat berdampak besar pada harga nikel di pasar internasional. Keputusan Indonesia untuk membatasi ekspor bijih nikel, yang merupakan salah satu pemasok utama bijih nikel di dunia, dapat mengurangi pasokan nikel yang tersedia di seluruh dunia, yang berpotensi mengakibatkan kenaikan harga nikel di pasar internasional. Berbagai industri hilir di negara lain yang sangat bergantung pada nikel, seperti industri baterai, baja tahan karat, dan elektronik, mungkin menghadapi peningkatan biaya produksi karena kenaikan harga nikel di pasar global. Kenaikan biaya ini dapat berdampak pada harga produk akhir, mengurangi margin keuntungan, dan bahkan mungkin menghentikan pertumbuhan industri tersebut (KemenkoPerekonomianRI, 2023; VOA Indonesia, 2023; Mongabay, 2024).

Selain itu, kenaikan harga nikel dapat menyebabkan inflasi di industri yang menggunakan nikel sebagai bahan baku utama. Konsumen akhir mungkin merasakan dampak dari kenaikan harga produk, seperti peralatan elektronik dan kendaraan listrik. Perekonomian negara-negara yang bergantung pada impor nikel dapat terjepit akibat pengurangan daya beli konsumen sebagai akibat dari inflasi ini. Kebijakan proteksionisme ini dapat memengaruhi komoditas lain juga. Jika harga nikel naik, negara-negara yang terkena dampak mungkin mencari pemasok atau bahan baku alternatif. Ini dapat mempengaruhi permintaan dan harga komoditas lain. Jika industri baja tahan karat beralih dari nikel ke bahan seperti kromium atau mangan, harga komoditas lain juga dapat naik.

Selain itu, ketidakpastian pasar akibat perubahan kebijakan ekspor dapat mengganggu rantai pasokan global dan mempengaruhi investasi di sektor pertambangan dan pengolahan logam. Investor akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi di negara-negara dengan kebijakan proteksionisme yang tidak stabil, sehingga dapat mempengaruhi aliran modal dan pengembangan proyek-proyek baru (Kasyfilham, 2024; Kompas, 2024a; Mongabay, 2024).

Kesimpulan

Kebijakan larangan ekspor biji nikel Indonesia merupakan langkah strategis untuk mengembangkan industri dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Meskipun menghadapi tantangan dari Uni Eropa dan putusan WTO, Indonesia tetap berkomitmen untuk mempertahankan kebijakan ini melalui proses banding. Keberhasilan dalam banding ini akan menjadi penentu penting bagi masa depan industri pengolahan nikel di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sambil menunggu hasil banding, Indonesia perlu terus mencari cara untuk memperkuat industrinya dan menjaga keseimbangan dalam perdagangan internasional.

Daftar Pustaka

- Diphayana, W. (2018) *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Firdaus, S.R. (2022) *Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan Nasional Vs Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional – LAN RI, LAN RI*. Available at: <https://lan.go.id/?p=10221> (Accessed: 5 July 2024).
- Gunadi, A. (2024) *Peluang Banding RI di WTO atas Ekspor Biji Nikel - Opini Katadata.co.id*, *Katadata.co.id*. Available at: <https://katadata.co.id/indepth/opini/66342e1219ea6/peluang-banding-ri-di-wto-atas-ekspor-biji-nikel> (Accessed: 5 July 2024).
- Hadad, H.H., Novianty, H. and Adolf, H. (2022) 'Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia Di Antara Stabilitas Perdagangan Internasional', *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 34(2), pp. 559–558.
- Hikmah, M. (2023) *Hilirisasi Berbagai Industri Ciptakan Lapangan Kerja Baru*, *idntimes.com*. Available at: <https://www.idntimes.com/business/economy/masrurotul-hikmah/hilirisasi-ciptakan-lapangan-kerja-c1c2> (Accessed: 5 July 2024).
- Hutabarat, G.F.I. (2024) *Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Pembatasan Ekspor Biji Nikel*. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Strong. Available at: <http://eprints.unimudasorong.ac.id/id/eprint/297/1/TA-Grace%20F.%20Irena%20Hutabarat-146420120011.pdf> (Accessed: 5 July 2024).
- Jamilus (2017) 'Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)', *Jikh*, 11(2), pp. 205–225.
- Kasyfilham, F. (2024) *Hilirisasi Nikel: Beban Berlapis Wilayah Pejuang Transisi Energi, Global Environmental Change*. Elsevier Ltd. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.102028>.
- KemenkoPerekonomianRI (2023) *Tingkatkan Daya Saing Nasional dan Ciptakan Multiplier Effect, Pengembangan Industri Hilirisasi Nikel Terus Didorong Pemerintah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Available at: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4915/tingkatkan-daya-saing-nasional-dan-ciptakan-multiplier-effect-pengembangan-industri-hilirisasi-nikel-terus-didorong-pemerintah> (Accessed: 5 July 2024).
- Kompas (2024a) *Studi: Di Balik Keuntungan Ekonomi, Industri Nikel Munculkan Berbagai Dampak Negatif Halaman all*, *Kompas.com*. Available at: [*Analisis larangan ekspor biji nikel Indonesia terhadap kondisi ekonomi nasional \(umi sholeha\)*](https://lestari.kompas.com/read/2024/02/23/100000686/studi--di-balik-keuntungan-</p>
</div>
<div data-bbox=)

- ekonomi-industri-nikel-munculkan-berbagai-dampak?page=all (Accessed: 5 July 2024).
- Kompas (2024b) *Transformasi dari Bijih Nikel ke Produk Berkualitas Tinggi*, *data.kompas.com*. Available at: https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/6632917800d5cb13138cafde (Accessed: 5 July 2024).
- Kompasiana (2024) *Proteksionisme Nikel Indonesia: Analisis dan Dampak Halaman 1 - Kompasiana.com*, *Kompasiana.com*. Available at: <https://www.kompasiana.com/hildaarez/65e01f8a14709349841ca8e2/proteksionisme-nikel-indonesia-analisis-dan-dampak> (Accessed: 5 July 2024).
- KoranTEMPO (2024) *Efek Negatif Penghiliran Nikel*, *koran.tempo.co*. Available at: <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/487447/apa-efek-negatif-penghiliran-nikel> (Accessed: 5 July 2024).
- Kurniawardhani, A.B. (2021) 'Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)', *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), pp. 49–53. Available at: <https://doi.org/10.23887/jjps.v9i1.30381>.
- Lenora, F. (2024) *Dosen UNAIR Ungkapkan dampak Hilirisasi pada Dunia Kerja*, *unfair.ac.id*. Available at: <https://unair.ac.id/dosen-unair-ungkap-dampak-hilirisasi-pada-dunia-kerja/> (Accessed: 5 July 2024).
- Mastuti, S. and Syarwi, P. (2021) 'Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dari Sudut Teori Keadilan John Rawls', *Jurnal Communitarian*, 2(1), pp. 691–709.
- MenkoPMK (2024) *Strategi Hilirisasi Untuk Tingkatkan Potensi Ekonomi Lokal Desa*, *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*. Available at: <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-hilirisasi-untuk-tingkatkan-potensi-ekonomi-lokal-desa> (Accessed: 5 July 2024).
- Menpanrb (2023) *Hilirisasi Pertambangan Indonesia Dapat Menjadi Peluang dan Langkah Menuju Masa Depan*, *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*. Available at: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/hilirisasi-pertambangan-indonesia-dapat-menjadi-peluang-dan-langkah-menuju-masa-depan> (Accessed: 5 July 2024).
- Mongabay (2024) *Hilirisasi Nikel di Halmahera Bisa Memperparah Krisis Iklim dan Susahkan Warga* - *Mongabay.co.id*, *Mongabay.co.id*. Available at: <https://www.mongabay.co.id/2024/02/13/hilirisasi-nikel-di-halmahera-bisa-perparah-krisis-iklim-dan-susahkan-warga/> (Accessed: 5 July 2024).
- Permatasari, D. (2022) *Larangan Ekspor Bijih Nikel: Perdagangan Bebas versus Proteksionisme*, *Freightsight.com*. Available at: <https://freightsight.com/article/larangan-ekspor-bijih-nikel-perdagangan-bebas-versus-proteksionisme-1> (Accessed: 5 July 2024).
- Putra, T.S.A. (2022) *Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia*, *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html> (Accessed: 5 July 2024).
- Radhica, D.D. and Wibisana, R.A.A. (2023) 'Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia', *Cendekia Niaga*, 7(1), pp. 74–84. Available at: <https://doi.org/10.52391/jcn.v7i1.821>.

-
- Ramadhana, M.A. *et al.* (2024) 'Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia', *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), pp. 185–199.
- Sari, L.A. and Sugito (2022) 'Impact of Indonesia's nickel ore export prohibition policy on Indonesia-European Union's political relations', *JURNAL INOVASI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (JISoP)*, 140(2), pp. 140–148. Available at: <https://doi.org/10.33474/jisop.v4i2.16650>.
- SetKabRI (2022) *Hilirisasi Bahan Tambang: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia |. Available at: <https://setkab.go.id/hilirisasi-bahan-tambang-sebuah-upaya-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat/> (Accessed: 5 July 2024).
- Spaying, T. (2024) *Hilirisasi: Definisi Dan Manfaatnya (2024)*, *palmoiliana.asia*. Available at: <https://palmoilina.asia/sawit-hub/apa-itu-hilirisasi/> (Accessed: 5 July 2024).
- Sukri, M. (2024) *Dampak Buruk Hilirisasi Nikel: WALHI Sulawesi Tantang Luhut hingga Gibran Debat Terbuka!*, *potretsulteng.com*. Available at: <https://potretsulteng.com/sosbud/dampak-buruk-hilirisasi-nikel-walhi-sulawesi-tantang-luhut-hingga-gibran-debat-terbuka/> (Accessed: 5 July 2024).
- Syafira, A.D. *et al.* (2023) 'Analisis Peluang, Tantangan, Dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional Di Tengah Gugatan Uni Eropa Di WTO', *Jurnal Economina*, 2(1), pp. 1125–1135. Available at: <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.258>.
- Tsirwiyati, D.N. (2023) 'Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia', *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Xi(231), pp. 1–12.
- VOA Indonesia (2023) *Aliansi Sulawesi: Hilirisasi Nikel Cenderung Merugikan Ketimbang Menguntungkan*, *Voaindonesia.com*. Available at: <https://www.voaindonesia.com/a/aliansi-sulawesi-hilirisasi-nikel-cenderung-merugikan-ketimbang-menguntungkan/7235316.html> (Accessed: 5 July 2024).
- Winona, C.V. *et al.* (2022) *Industri Nikel Indonesia Pasca Sengketa Perdagangan dengan Uni Eropa – CWTS Pusat Studi Perdagangan Dunia, Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada*. Available at: <https://cwts.ugm.ac.id/2022/11/03/industri-nikel-indonesia-pasca-sengketa-perdagangan-dengan-uni-eropa/> (Accessed: 5 July 2024).